

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK SENI DAN USAHA KECIL MENENGAH KELURAHAN MANGKUBUMEN (MPOK SINAH KLAMBEN) DI KELURAHAN MANGKUBUMEN KOTA SURAKARTA

Istianawati¹, Sudaryanti²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: istiana08@student.uns.ac.id¹, sudaryanti26@gmail.com²

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah pembangunan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendayagunakan masyarakat melalui keahlian dan potensi yang dimilikinya, dengan harapan masyarakat dapat mengembangkan diri secara lebih mandiri. Kelurahan Mangkubumen merupakan salah satu kelurahan yang berusaha memberdayakan masyarakat, salah satunya melalui Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Mpok Sinah Klamben. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mpok Sinah Klamben telah dilakukan melalui tiga tahap pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran telah dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat mendukung adanya program ini, namun terdapat juga beberapa yang kurang mendukung. Tahap pengkapasitasan telah dilakukan melalui pembentukan Pengurus Mpok Sinah Klamben, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan, serta membuat aturan main diantara mereka. Tahap pendayaan telah dilakukan melalui pemberian fasilitas pendukung, meningkatkan promosi melalui media sosial, dan mengikutsertakan Mpok Sinah Klamben dalam *event-event*.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Program Pemberdayaan, Mpok Sinah Klamben

ABSTRACT

Community empowerment is one of the development steps that can be interpreted as a process of empowering the community through its expertise and potential, with the hope that the community can develop themselves more independently. Mangkubumen Village is one of the villages that seeks to empower the community, one of which is through the Mangkubumen Village Small and Medium Enterprises and Arts Group Program (Mpok Sinah Klamben). This study aims to determine the process of community empowerment through the Mpok Sinah Klamben Program. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants in this research were selected purposively. The validity of the data used is a data triangulation technique or source, while the data analysis technique used is an interactive analysis model from Miles and Huberman. The results showed that Community Empowerment through the Mpok Sinah Klamben Program had been carried out through three stages of empowerment, namely awareness, capacity building, and empowerment. The awareness stage has been carried out through outreach to the entire community. Most of the community supports this program, but there are also some who do not support it. The capacity building stage has been carried out through the formation of the Mpok Sinah Klamben Board, providing technical guidance and training, as well as developing the rules of the game between them. The empowerment stage has been carried out through providing supporting facilities, increasing promotions through social media, and involving Mpok Sinah Klamben in events.

Keywords: *Community Empowerment, Small and Medium Enterprises, empowerment programs, Mpok Sinah Klamben*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang selama ini berkembang di Indonesia. UMKM telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan bidang usaha yang beraneka ragam. Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Selama ini UMKM telah berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia bahkan UMKM terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center of Information and Development Studies*), Rohmad Hadiwijoyo (dalam Meryana, 2012) mengatakan bahwa ada tiga hal yang membuat UMKM mampu bertahan pada kondisi krisis. Pertama, pada umumnya, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dihasilkan oleh UMKM. Permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang merosot akibat krisis. Berbeda dengan usaha besar (makro) yang justru bertumbangan saat krisis melanda. Kedua, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang-barang impor, melainkan memanfaatkan sumber daya lokal. Ketiga, umumnya UMKM

berjalan dengan dana sendiri dan tidak ditopang oleh dana dari pinjaman bank.

Dibalik peran penting yang dimainkan oleh UMKM di Indonesia, UMKM masih sering mengalami beberapa permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Menurut Budiarto, et all (2016), perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami hambatan baik dari permasalahan internal yang meliputi, rendahnya kualitas sumber daya manusia; lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar; masalah permodalan; masalah teknologi; masalah organisasi dan manajemen, serta pemasalahan eksternal yang meliputi, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif; terbatasnya sarana dan prasarana usaha; implikasi otonomi daerah; implikasi perdagangan bebas; kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif; serta ekspansi pasar modern.

Adanya berbagai permasalahan ini memungkinkan UMKM akan sulit berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun dan mengembangkan UMKM karena membangun UMKM berarti membangun ekonomi masyarakat banyak, atau dengan kata lain membangun ekonomi kerakyatan (Anwas, 2014). Permasalahan itulah yang kemudian mendasari pemerintah untuk

membuat kebijakan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemberdayaan UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Budiarto, et all (2016) bahwa pengembangan dengan pemberdayaan (*empowerment*) akan mampu membuat sektor ekonomi rakyat ini menjadi pilar utama strategi pembangunan.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya bukan hanya menekankan pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga memerlukan penekanan pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan sering kali mengabaikan proses dalam pemberdayaan, hal inilah yang kemudian menyebabkan pemberdayaan masyarakat itu mengalami kegagalan. Dalam beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Safriansyah, et all (2019) yang berjudul “*Strategies for Improving the Competitive Advantages of SMES in the Era of Regional Autonomy*” menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyusun strategi untuk mengembangkan UMKM, yaitu melalui pelatihan dan konseling. Namun, dalam proses pemberdayaannya justru masih mengalami kendala terkait penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk mengembangkan UMKM. Padahal fasilitas dan infrastruktur tersebut sangat diperlukan

untuk mendukung proses pemberdayaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat itu menjadi tidak benar-benar berdaya.

Di Indonesia, upaya untuk memberdayakan UMKM ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 saja tetapi kewajiban Pemerintah khususnya Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali UMKM. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk UMKM ini sangat penting terutama dalam pembuatan kebijakan pemberdayaan. Kebijakan dan program-program pemberdayaan sangat memerlukan strategi dan langkah nyata dari pemerintah agar pemberdayaan dapat lebih terarah. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan UMKM adalah dengan menciptakan program inovasi pemberdayaan

dengan tujuan agar masyarakat dan UMKM lebih berkembang dan berdaya.

Pemerintah Kelurahan merupakan salah satu komponen Pemerintah di tingkat Daerah yang bersinergis untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya.

Kelurahan Mangkubumen yang terletak di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta merupakan salah satu kelurahan yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat. Upaya yang dilakukan Kelurahan Mangkubumen adalah dengan membentuk program-program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben). Pembentukan program pemberdayaan ini pada dasarnya tidak terlepas dari adanya permasalahan. Adanya permasalahan ruang publik yang

terbatas, permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih sulit berkembang inilah yang mendasari munculnya Program Mpok Sinah Klamben. Adanya permasalahan tersebut tidak serta merta selalu menjadi permasalahan dan tidak dapat diatasi. Justru dibalik adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat mengatasi permasalahan itu dengan menyandingkan potensi-potensi yang dimiliki, seperti kepemilikan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen dengan luas sekitar 1.800 m² dan potensi UKM dari masyarakat yang nantinya dapat dikembangkan dan diberdayakan.

Adanya keunggulan potensi Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen ini pada awalnya hanya digunakan untuk rapat-rapat, pertemuan yang bersifat formal dan kegiatan pemerintahan lainnya. Namun, melihat kepemilikan aset berupa gedung besar dengan halaman yang luas tersebut, Lurah Mangkubumen (2017-2020), Beni Supartono Putro mempunyai gagasan agar pemanfaatan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen dapat dinikmati oleh masyarakat umum dan terdapat kegiatan perekonomian yang berjalan di dalamnya. Hal ini lah yang kemudian menjadi latar

belakang terbentuknya inovasi Program Mpok Sinah Klamben yang awalnya bernama “Menjual Sasono Krida”. Program Mpok Sinah Klamben dibentuk dengan mengumpulkan seluruh potensi yang ada di masyarakat seperti, pedagang, penari, jasa sewa kursi, tata rias, sound system, dll.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Mpok Sinah Klamben ini merupakan alat yang strategis untuk mewadahi aktivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. UKM yang menjadi anggota Mpok Sinah Klamben sangat merasa diuntungkan dengan adanya program ini. Selain dapat mewadahi aktivitas seni budaya dan meningkatkan perekonomian UMKM, uniknya Program Mpok Sinah Klamben ini turut membawa Kelurahan Mangkubumen menjadi kelurahan terbaik se-Indonesia (Pemkot Surakarta, 2019). Program Mpok Sinah Klamben menjadi salah satu program pemberdayaan inovasi terbaik dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Hal inilah yang menjadi sesuatu yang unik di Kelurahan Mangkubumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program

Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) pemberdayaan merupakan proses menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Anwas (2014) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, menuju kemandirian.

Pada dasarnya, pemberdayaan bukan merupakan proses yang instan, namun membutuhkan proses dan tahapan untuk dapat menciptakan masyarakat yang benar-benar berdaya. Oleh karena itu, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menjelaskan dalam proses pemberdayaan terdapat tiga tahapan, yaitu :

1. Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahap awal dalam pemberdayaan. Masyarakat yang menjadi target pemberdayaan awalnya diberi penyadaran bahwa mereka sebenarnya memiliki keahlian dan potensi untuk dapat dikembangkan. Tahap ini dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*.

2. Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan atau *capacity building* dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat yang diberdayakan itu mampu menerima daya yang akan diberikan. Tahap pengkapasitasan dalam hal ini terdiri dari :

a. Pengkapasitasan manusia.

Pengkapasitasan manusia dapat dilakukan melalui pemberian kapasitas kepada masyarakat yang ingin diberdayakan.

b. Pengkapasitasan organisasi

Pengkapasitasan organisasi dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dari masyarakat yang akan diberdayakan.

c. Pengkapasitasan sistem nilai

Pengkapasitasan sistem nilai berarti memberikan kapasitas kepada manusia dan organisasinya melalui pemberian atau pembuatan “aturan main” di antara mereka. Sistem nilai dalam cakupan organisasi, terdiri dari Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan Koperasi, dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai meliputi budaya organisasi, etika dan *good governance*.

3. Pendayaan

Tahap pendayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat menjadi berdaya dengan keahlian dan potensi yang dimilikinya. Tahap pendayaan dapat dilakukan melalui pemberian daya, otoritas, peluang dan kekuasaan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen

dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan, serta data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive*. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Mangkubumen (2017-2020), Ketua dan Pengurus Mpok Sinah Klamben serta anggota Mpok Sinah Klamben.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data atau sumber, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa data Model Interaktif dari Miles and Huberman (1994), yang terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *conclusions : drawing/verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kelurahan Mangkubumen sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberdayaan masyarakat, telah berupaya menciptakan inovasi-inovasi program pemberdayaan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, Kelurahan Mangkubumen berlandaskan pada visi misi pemberdayaan masyarakat. Visi tersebut yaitu “Terwujudnya *One Village One Destination* Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun misi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mangkubumen meliputi :

1. Mewujudkan pemerintahan kelurahan yang mandiri dengan manajemen pemerintah kelurahan yang berbasis *good governance*
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga masyarakat kelurahan
3. Mewujudkan pemberdayaan dengan “Menjual Sasono Krida Warga dengan Penguatan Mpok Sinah Klamben dan Mangku Lawren (Mangkubumen Lawan Rentenir)”.

Program Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen (Mpok Sinah Klamben) merupakan salah

satu program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangkubumen yang dibentuk pada tahun 2018. Proses pemberdayaan melalui Program Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan :

1. Penyadaran

Tahap pemberdayaan yang pertama dilakukan adalah penyadaran. Tahap penyadaran pada dasarnya dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang akan diberdayakan, tujuannya adalah agar masyarakat sadar bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi dan usaha untuk dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam menyadarkan masyarakat adalah melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat umum di Kelurahan Mangkubumen. Dalam sosialisasi tersebut Pemerintah Kelurahan Mangkubumen menjelaskan bahwa akan membuat sebuah program pemberdayaan bernama Mpok Sinah Klamben. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan pendaftaran dan pencatatan nama-nama masyarakat yang mempunyai usaha maupun

masyarakat yang mempunyai keterampilan dalam bidang kesenian. Semua nama-nama masyarakat yang memiliki usaha didata dan dicatat melalui perwakilan RT dan RW dari masing-masing tempat.

Dalam sosialisasi yang dilakukan, Lurah Mangkubumen (2017-2020), mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengikuti sangat antusias dan mendukung adanya Program Mpok Sinah Klamben karena pada dasarnya program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, namun terdapat juga masyarakat yang kurang mendukung dan apatis. Dalam menyikapi pendapat dari masyarakat, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen tidak memaksakan kehendak dari mereka. Jika memang terdapat pihak-pihak yang kurang setuju maka itu tidak masalah. Adapun salah satu alasan yang menyebabkan beberapa kelompok UKM kurang setuju dengan adanya Program Mpok Sinah Klamben ini adalah karena sebagian dari mereka harus mengubah pola berjualan yang diterapkan. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen menerapkan sebuah aturan bahwa pasar UKM yang diselenggarakan di halaman Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen biasanya dimulai pada malam hari, yaitu pukul 19.00 WIB. Sehingga dari aturan tersebut, beberapa

pedagang yang pada dasarnya berjualan pada pagi atau siang hari harus mengubah pola berjualan mereka, selain itu kuliner yang dijual pun juga harus menyesuaikan. Hal ini lah yang menyebabkan beberapa masyarakat kurang mendukung adanya Program Mpok Sinah Klamben.

Pada dasarnya masyarakat yang termasuk dalam kelompok seni dan kelompok UKM di Kelurahan Mangkubumen itu masuk dalam anggota Mpok Sinah Klamben. Namun pada pemanfaatan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen ini lebih dikhususkan untuk kelompok seni dan kelompok UKM yang bergerak di bidang kuliner. Sehingga, kelompok UKM diluar usaha kuliner tidak berpartisipasi langsung di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa kelompok UKM pasif berpartisipasi. Ketua Pengurus Mpok Sinah Klamben juga mengungkapkan bahwa masih terdapat masyarakat yang *mindsetnya* bukan benar-benar sebagai pedagang atau dalam artian berjualan itu hanya untuk sampingan, bukan sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi hidup. Selain itu, khususnya untuk kelompok UKM yang berjualan di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen juga masih terdapat pedagang yang hanya berjualan ketika

kondisi di gedung sedang ramai dan tidak berjualan ketika kondisi sepi.

2. Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan merupakan salah satu bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) tahap pengkapasitasan dibagi menjadi pengkapasitasan manusia, pengkapasitasan organisasi dan pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pengkapasitasan perlu dilakukan agar masyarakat yang akan diberdayakan mampu dan siap untuk menerima daya.

a. Pembentukan pengurus Mpok Sinah Klamben

Pembentukan pengurus Mpok Sinah Klamben merupakan salah satu wujud pengkapasitasan organisasi. Sebelum kelompok seni dan kelompok UKM diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola Program Mpok Sinah Klamben, maka mereka perlu dibentuk kepengurusan sebagai wadah untuk melatih mereka agar mampu mengelola dan mengatur sendiri tugas yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Program Mpok Sinah Klamben.

Pembentukan pengurus Mpok Sinah Klamben didasarkan pada surat keputusan Lurah Mangkubumen nomor 148.16/698.1 tentang Pembentukan

Pengurus Mpok Sinah Klamben (Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen), Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kepengurusan Mpok Sinah Klamben ini dipilih oleh pihak Kelurahan Mangkubumen yang anggotanya sebagian besar adalah dari tokoh masyarakat, namun dalam susunan pengurus tersebut juga terdapat pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) maupun dari pegawai Kelurahan.

b. Pengadaan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan

Dalam hal pengkapasitasan manusia, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen bersama *stakeholders* lainnya telah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada anggota Mpok Sinah Klamben. Bimtek yang diberikan kepada anggota Mpok Sinah Klamben ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen, tetapi diberikan oleh dinas-dinas, seperti Dinkop UKM dan Dinas Perdagangan karena dari pihak Pemerintah Kelurahan Mangkubumen sendiri dari segi kapasitas tidak mempunyai.

Adapun bimtek yang diberikan kepada anggota Mpok Sinah Klamben

salah satunya adalah bimtek tentang manajemen. Manajemen sangat diperlukan dalam berusaha agar setiap pengusaha itu dapat mengatur dan mengelola usahanya dengan baik. Selain itu, anggota Mpok Sinah Klamben juga dibekali adanya bimtek mengenai pengemasan barang (*packaging*). *Packaging* dalam dunia usaha juga tidak kalah penting karena *packaging* akan mempengaruhi minat pengunjung yang akan membeli produk mereka dan menjadikan Mpok Sinah Klamben agar tidak kalah saing.

Selain itu, Mpok Sinah Klamben juga diberikan pelatihan-pelatihan, seperti dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan pembekalan preventif agar anggota Mpok Sinah Klamben tidak masuk dalam MLM, serta dari Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) yang mengenalkan aplikasi order makanan online, seperti gofood dan grabfood. Tujuannya adalah agar usaha kuliner yang digeluti anggota Mpok Sinah Klamben ini dapat lebih berkembang karena pada era saat ini, teknologi sangat diperlukan untuk mempermudah

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Memberikan "Aturan Main" dalam Mpok Sinah Klamben

Memberikan atau membuatkan "aturan main" kepada masyarakat yang ingin diberdayakan merupakan salah satu langkah dalam proses pengkapasitasan, yaitu pengkapasitasan sistem nilai. Dalam memberikan pengkapasitasan sistem nilai, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen telah membantu anggota Mpok Sinah Klamben untuk mengatur dan mengelola segala tugasnya dengan membuatkan aturan main dalam pelaksanaan Program Mpok Sinah Klamben. Aturan main yang ditentukan oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen salah satunya adalah mengenai mekanisme dan aturan peminjaman Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen. pemanfaatan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen pada dasarnya diberikan secara gratis untuk masyarakat umum, namun masyarakat yang ingin meminjam atau mengadakan keperluan seperti hajatan, pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya diharuskan menggunakan produk dan jasa dari

Mpok Sinah Klamben. Sehingga masyarakat yang ingin menggunakan gedung wajib berkoordinasi dengan Mpok Sinah Klamben.

Setiap masyarakat yang ingin meminjam atau menggunakan Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen wajib meminta izin terlebih dahulu kepada Lurah. Setelah Lurah menyetujui kemudian Lurah mendisposikannya kepada Pengurus Mpok Sinah Klamben untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan masyarakat yang meminjam. Untuk syaratnya, masyarakat yang ingin meminjam gedung tidak diperbolehkan memakai fasilitas dari luar, seperti meja, kursi, makanan, sound system, tata rias dan lainnya. Semua fasilitas yang diperlukan harus semuanya dari Mpok Sinah Klamben, tujuan dilakukannya sistem ini adalah untuk melindungi dan membuka pasar peluang bagi para pelaku UKM di Kelurahan Mangkubumen.

Mengenai penyediaan makanan untuk keperluan peminjaman gedung. Aturannya adalah bagi kelompok UKM di bidang kuliner yang ingin memfasilitasi kebutuhan konsumsi bagi peminjaman gedung harus dilakukan

secara bergilir, artinya tidak hanya satu orang saja yang memfasilitasi, dari beberapa pedagang yang ada harus bergantian. Walaupun semua UKM yang tergabung dalam Mpok Sinah Klamben berhak untuk memenuhi kebutuhan peminjaman gedung, tetapi yang paling diutamakan adalah UKM rumahan yang tidak berjualan di Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen. Aturan ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan kuliner tidak dimonopoli oleh satu orang saja.

Selain itu, jika ada masyarakat yang ingin meminjam Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen dan memanfaatkan produk dan jasa dari Mpok Sinah Klamben, maka untuk aturan pembayarannya langsung dengan pedagang atau UKM yang bersangkutan. Sehingga dari Pemerintah Kelurahan Mangkubumen maupun dari Pengurus Mpok Sinah Klamben tidak mendapat hasil dari peminjaman gedung tersebut. Semua pendapatan murni untuk UKM yang bersangkutan.

3. Pendayaan

Tahap pendayaan merupakan salah satu proses dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang kepada

masyarakat untuk dapat berkembang. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kelurahan Mangkubumen untuk memberikan akses kepada Mpok Sinah Klamben salah satunya adalah dengan menyediakan tempat berjualan yang berada di Halaman Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen. Berdasarkan keputusan Lurah Mangkubumen Nomor 430/730.4 tentang Pengelolaan Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen sebagai tempat publik menetapkan bahwa Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen sebagai tempat publik yang dapat digunakan secara GRATIS dan dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dengan memberdayakan MPOK SINAH KLAMBEN (Kelompok Seni dan Usaha Kecil Menengah Kelurahan Mangkubumen). Berdasarkan surat keputusan tersebut, dapat diketahui bahwa pemanfaatan Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen ini diberikan secara gratis oleh Kelurahan, sehingga masyarakat maupun kelompok usaha kecil menengah yang ingin berjualan tidak dipungut biaya. Gedung Sasnono Krida Warga Mangkubumen yang terletak di tengah kota ini merupakan salah satu lokasi yang sangat strategis untuk dijangkau masyarakat lain, sehingga dengan adanya gedung besar dan serbaguna ini, masyarakat dapat

memanfaatkannya untuk berkegiatan dan kelompok UKM dapat memanfaatkannya untuk berjualan dan menarik minat pengunjung.

Selain menyediakan tempat untuk beraktivitas dan menjajakan dagangannya, kelompok UKM juga mendapat beberapa fasilitas atau sarana prasana yang mendukung pelaksanaan Program Mpok Sinah Klamben. Fasilitas tersebut meliputi, listrik, air, wifi, tenda, meja, kursi, stand makanan dan mmt. Semua fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Mangkubumen tersebut diberikan secara gratis untuk kelompok UKM yang berjualan di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen.

Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam memberikan akses dan peluang kepada Mpok Sinah Klamben juga melakukan promosi. Promosi untuk membuat Mpok Sinah Klamben berkembang dan diketahui masyarakat luas ini dilakukan melalui media sosial karena saat ini kecepatan perputaran informasi akan lebih cepat melalui media sosial. Selain itu, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam memberikan akses dan peluang kepada Mpok Sinah Klamben juga dilakukan dengan mengikutsertakan Mpok Sinah Klamben dalam event-event yang

diselenggarakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, keikutsertaan Mpok Sinah Klamben dalam event-event tersebut lebih diutamakan untuk kelompok UKM yang bergerak di bidang kuliner, seperti event Festival Kuliner dan Festival Jajan Pasar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mpok Sinah Klamben di Kelurahan Mangkubumen telah dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. Meskipun telah dilakukan dengan ketiga tahapan tersebut, namun dalam prosesnya, terutama dalam tahap penyadaran dan tahap pengkapasitasan masih belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang mendukung adanya Program Mpok Sinah Klamben. Beberapa masyarakat kurang mendukung karena harus mengubah pola berjualan.
2. Kurangnya kesadaran dari anggota untuk terlibat aktif dalam Program Mpok Sinah Klamben.
3. *Mindset* pedagang yang masih belum berkembang dan kurang bersungguh-

sungguh dalam mengikuti Program Mpok Sinah Klamben.

4. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan anggota dalam pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti, yaitu :

1. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat mempertimbangkan dan memberikan izin UKM untuk berjualan di pagi atau siang hari. Sehingga UKM yang pada dasarnya berjualan pada pagi atau siang hari tidak perlu mengubah pola berjualan menjadi malam hari dan untuk beberapa UKM juga tidak perlu mengubah sajian makanan yang dijual. Stand untuk berjualan juga dapat dimanfaatkan secara bergantian antara UKM yang berjualan di pagi atau siang hari dan UKM yang berjualan di malam hari. Sehingga semua UKM dapat sama-sama memanfaatkan fasilitas di Gedung Sasono Krida Warga Mangkubumen.
2. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat memberikan motivasi atau sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk mengembangkan *mindset* UKM agar bersungguh-sungguh dalam berjualan. Hal ini dilakukan untuk

menyadarkan dan meyakinkan masyarakat bahwa Program Pemberdayaan Mpok Sinah Klamben ini memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat karena jika kesadaran dari masyarakat saja masih kurang bagaimana mereka dapat berdaya.

3. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen sebaiknya perlu mendata ulang anggota-anggota Mpok Sinah Klamben yang benar-benar berpartisipasi aktif dalam Program Mpok Sinah Klamben karena dalam data yang diperoleh masih terdapat UKM yang ikut terdaftar tetapi tidak berpartisipasi.
4. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen sebaiknya perlu mendorong partisipasi UKM dengan ajakan untuk mengikuti segala bentuk bimbingan atau pelatihan yang diberikan kepada Mpok Sinah Klamben.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Budiarto, Rachmawan, et all (2016). *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Mardikanto, Totok. (2010). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta : Uns Press.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis. 2d Ed. Thousand Oaks, Ca : Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Jurnal Ilmiah**
- Dass, Mahaganapathy, et all. (2019). Community Empowerment through the Mykasih Entrepreneurship Program towards Urban Poverty Alleviation in Kuala Lumpur, Malaysia. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 7 (5).
- Ismail, Fitri, et all. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha Kecil (Studi Kasus : Perajin Emping Melinjo oleh PT. Telekomunikasi, tbk di Desa Narimbang, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang). *Jurnal Adbispreneur*, 1(2).
- Kusumawardhani, Dhian, et all. (2015). The Role of Government in MSMEs : The Empowerment of MSMEs During the Free Trade Era in Indonesia. *Australasian Accounting. Business and Finance Journal*, 9 (2).
- Safriansyah, et all. (2019). Strategies for Improving the Competitive Advantages of SMES in the Era of Regional Autonomy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9 (3).
- Sunariani, Ini Nyoman, et all. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah dan Manajemen*, 2 (1).
- Wahyuni, Dinar. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83-100.
- Dokumen**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Klamben dan Mangku Lawren. Diakses melalui <https://surakarta.go.id/?p=14189>.

Berita Media Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/daya>.

Kementerian Keuangan. (2012). Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/laporan_tim_kajian_kebijakan_antisipasi_krisis_tahun_2012_melalui_kur.pdf.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB).

Isnanto, Bayu Ardi. (2019, Agustus 16). Mengulas 3 Program yang Jadikan Mangkubumen Kelurahan Terbaik Se-Indonesia. Detik.com. Diakses melalui <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4668774/mengulas-3-program-yang-jadikan-mangkubumen-kelurahan-terbaik-se-indonesia>.

Meryana, Ester. (2012, Maret 28). Tiga Hal yang Buat UMKM Tahan Krisis. Kompas.com. Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis>.

Pemerintah Kota Surakarta. (2019, Agustus 21). Terima Kasih Mpok Sinah